




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Bidang Inovasi dan Teknologi

NOMOR SOP	: No. 20.1 / BPPKB / 2018
TANGGAL PEMBUATAN	: 9 APRIL 2018
TANGGAL REVISI	: 25 APRIL 2018
TANGGAL EFEKTIF	: MEI 2018
DISAHKAN OLEH	Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat,  AGATHO ADAN, S.Sos., M.Si 19590805 198701 1 002

NAMA SOP	Pengelolaan Jurnal Litbang
----------	-----------------------------------

KUALIFIKASI PELAKSANA :

- A. Redaksi Pelaksana:**
1. Memahami struktur organisasi Pemerintahan Daerah .
 2. Memahami konsep dasar metodologi penelitian.
 3. Memahami konsep dasar dari sistem operasional komputer.
 4. Pendidikan Minimal S1
- B. Dewan Redaksi**
1. Memahami konsep dasar metodologi penelitian.
 2. Memahami Pengelolaan Jurnal Ilmiah
 3. Pendidikan Minimal S2
 4. Jabatan Fungsional rumpun penelitian (Dosen, Peneliti, Perekayasa)
- C. Mitra Bestari**
1. Memahami konsep dasar metodologi penelitian.
 2. Memahami Pengelolaan Jurnal Ilmiah
 3. Pendidikan Minimal S2 diutamakan Profesor atau Pendidikan S3
 4. Jabatan Fungsional rumpun penelitian (Dosen, Peneliti, Perekayasa)
- D. Penulis**
1. Jabatan Fungsional rumpun penelitian (Dosen, Peneliti, Perekayasa) atau masyarakat ilmiah lainnya

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

- | | |
|---------------------|-----------------------------------|
| 1. ATK | 5. Referensi/ Literatur pendukung |
| 2. Komputer/ Laptop | 6. Buku Kerja |
| 3. LCD Proyektor | 7. Internet |
| 4. Lembar Disposisi | |

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. *Sumber Pengumpulan data: Jabatan Fungsional rumpun penelitian (Dosen, Peneliti, Perekayasa) atau masyarakat ilmiah lainnya*

- DASAR HUKUM :**
1. Undang - undang Nomor 18 Tahun 2002; tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4219);
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

KETERKAITAN :

1. SOP Pengadministrasian surat
2. SOP Pengelolaan keuangan dan Asset

PERINGATAN :

1. Jika SOP tidak dilakukan, maka pengelolaan Jurnal Litbang tidak dapat dilaksanakan.
2. Diperlukan koordinasi dengan *stakeholder* terkait.